

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Sakti Lubis No. 7R Tel. (061) 7867465 - 7860466. Fax. (061) 7867338

E-Mail: dispupr@sumutprov.go id

MEDAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR: 120 /PUPR-UM/ 894 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 120/PUPR-UM/825 TAHUN 2024 TANGGAL 06 FEBRUARI 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, maka dipandang perlu diubah dengan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
- 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023;
- 10. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/82/KPTS/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/34/KPTS/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

Menunjukan/mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja, yaitu:
 - Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) / Unit SKPD, yang meliputi:
 - a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
 - a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan

- c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan Pada tanggal (2 // EBNVAN) 2024

ELAKU PENGGUNA ANGGARAN

PIt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAH PROVINSI SUMATERA UTARA

MULYONO, ST, M.SI PEMBINA UTAMA MUDA NP. 19740511 200003 1 003

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;

2. Para Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu;

SUMATERA

3. Yang bersangkutan;

4. Arsip.

Nama Kegiatan	Nama Sub Keglatan	Pagu Anggaran	Name PPTK Lama	NIP	Nama PPTK Baru	Z	NIX	aman	Golongani
BIDANG BINA MARGA		674.077.963.984,00							Pangkat
	Pembangunan Jembatan	136.743.233.423,00	Nazaruddin Nasution, ST, M.AP	19680425 199203 1 001	Muhammad Yudra, ST	19780605 200901 1 005	1271150506780007	785403999121000	Penata Tingkat I III/d
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.228.073.000,00	Nazaruddin Nasution, ST, M.AP	19680425 199203 1 001	Reza Agus Parlindungan Harahap, ST	19870820 201507 1 001	1271112008870005	745795278126000	Penata III/o
	Pemeliharaan Berkala Jalan	25.273.524.449,00	Nazaruddin Nasution, ST, M.AP	19680425 199203 1 001	Muhammad Yudra, ST	19780605 200901 1 005	1271150506780007	785403999121000	Penata Tingkat I III/d
	Pembangunan Jalan	510.833.133.112,00	Nazaruddin Nasution, ST, M.AP	19680425 199203 1 001	Muhammad Yudra, ST	19780605 200901 1 005	1271150506780007	785403999121000	Penata Tingkat I
BIDANG PERENCANAAN		27.376.256.000,00							
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantal pada Wilayah Sungai Lintas Daerah	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan il Bangunan Penampung Air Lainnya	3.233.635.000,00	Тетар	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	3.153.326.000,00	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Ingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	600.000.000,00	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	16.901.735.000,00	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	899.109.000,00	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
	Pengelolaan Leger Jalan	2.588.451.000,00	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
BIDANG SUMBER DAYA AIR		23.511.745.918,00							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	2.856.520.000,00	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tefap	Tetap	Tetap
	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.746.250.000,00	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai A	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	933.300.497,00	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	987.040.500,00	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
0 > 1	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungal Kewenangan Provinsi	1.555.297.844,00	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
סספ	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	4.370.960.000,00	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi On Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Iri	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	266.040.000,00	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	10.796.337.077,00	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

eliharaan Rutin Jembatan 506.000.000,00 Tetap rafauan dan Evaluasi relenggaraan Jalan/Jembatan 394.642.000,00 Tetap aliharaan Rutin Jalan 3.734.500.000,00 Tetap 3.734.500.000,00 Tetap 1.649.484.649.171		Total Keseluruhan			Penyelenggaraan Jalan Provinsi		Nama Kegiatan	
Tetap		eluruhan	Pembangunan Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Nama Sub Keglatan	
Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap		1.649.484.649.171	34.962.000.000,00	3.734.500.000,00	394.642.000,00	506.000.000,00	Pagu Anggaran	
Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap PRINTAH PROPERTIAN UMUM PRINTAH PROPERTIAN UMUM PRINTAH ON PEKERJAAN UMUM PRINTAH PRINTAH UMUM PRINTAH PRINTAH UMUM PRINTAH PRINTAH PRINTAH PRINTAH UMUM PRINTAH PRIN			Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Nama PPTK Lama	The state of the s
Tetap Tetap Tetap			Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	100	
tap Tetap tap Tetap tap Tetap tap Tetap tap Tetap Tetap			Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Nama PPTK Baru	
tap Tetap tap Tetap tap Tetap tap Tetap tap Tetap tap Tetap	QUMERINTAN		Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	N P	
Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap	56		Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	MIK	
Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap	EKERJAAN UMUM		Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	SMdN	
			Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Golongan) Pangkat	